



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

# LAKIP

---

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH

2019



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
TAHUN ANGGARAN 2019

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 ini menyajikan hasil pengukuran sasaran kinerja yang dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2019 yang disusun berdasarkan capaian indikator Dinas Komunikas dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2019. Segenap kemampuan, gagasan dan upaya terbaik telah dicurahkan dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing.

Dengan disusunnya LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 ini, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi peningkatan kinerja bagi internal Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan menjadi media komunikasi bagi masyarakat yang ingin mendapatkan informasi terkait kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Melalui laporan kinerja ini pula diaharapkan masyarakat dapat mengetahui perkembangan kebijakan dibidang komunikasi dan informatika dan dapat memberikan umpan balik berupa saran dan masukan konstruktif demi penyempurnaan pembangunan bidang komunikasi dan informatika ke depannya.

Akhirnya ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian laporan ini.

Pangkalpinang, Maret 2020

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



**Dr. Drs. SUDARMAN, MMSI**

Penyelia Utama Madya

0640915 199002 1 002

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) memiliki 3 (tiga) landasan utama yaitu: transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Akuntabilitas dalam hal ini merupakan perwujudan kewajiban unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kewajiban organisasi dalam rangka akuntabilitas, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menyusun tugas pokok perlu menyusun Laporan Kinerja di akhir tahun pelaksanaan kinerja selama tahun 2019 sesuai dengan program/ kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Tahun 2019, sehingga laporan kinerja merupakan sarana pengukuran dan evaluasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai tolok ukur dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat dalam bidang komunikasi dan informatika.

### **1.2. LANDASAN HUKUM**

Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 adalah:

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri A);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
17. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

### **1.3. Tujuan**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan tentang kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun selama tahun 2019. Hasilnya diharapkan dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan evaluasi dan acuan dalam menyusun program dan kegiatan di tahun berikutnya, sehingga program di tahun mendatang dapat disusun dengan fokus, efektif, efisien dan terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### **1.4. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika**

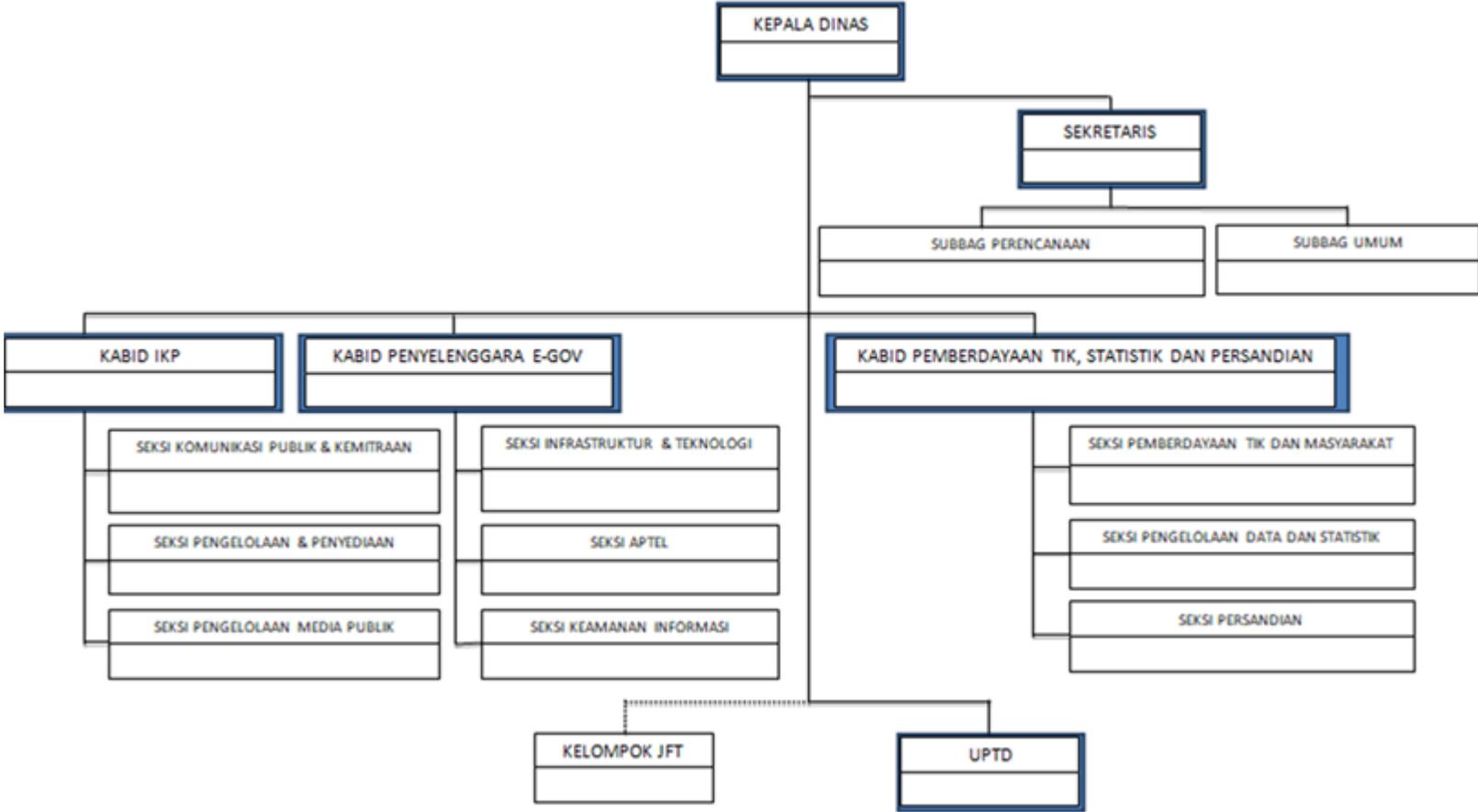
Sesuai Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 disebutkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, bidang persandian dan bidang statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik yang menjadi kewenangan provinsi;
- 2) Penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik yang menjadi kewenangan provinsi;
- 3) Penyelenggaraan administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika;
- 4) Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas Komunikasi dan Informatika;
- 5) Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan atasan.

Di bawah ini diuraikan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 sebagai berikut:

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**



## **KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Tugas : Memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik yang menjadi kewenangan provinsi, melaksanakan dekonsentrasi dan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya.

Fungsi :

1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
2. Penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan memimpin pelaksanaan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
3. Penyelenggaraan administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika;
4. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
5. Penyelenggaraan dan pengordinasian Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD);
6. Penyelenggaraan pembinaan dan promosi pegawai Aparatur Sipil Negara;
7. Penyelenggaraan pembinaan kelompok jabatan fungsional;
8. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan atasan.

## **SEKRETARIAT DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Tugas : Sekretariat mempunyai tugas memverifikasi, mengkoordinir, mempromosikan, memimpin, membina, mengevaluasi, mengendalikan dan menyelenggarakan administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian, keuangan serta membantu Kepala Dinas mengkoordinasikan bidang-bidang.

Fungsi :

1. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rumusan bahan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, bidang statistik, yang dilaksanakan oleh bidang-bidang;
2. Penyelenggaraan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan;
3. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan dinas Komunikasi dan Informatika;
4. Penyelenggaraan Pembinaan dan promosi pegawai;

5. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan atasan;

a. SUBBAG PERENCANAAN

Tugas : melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika.

b. SUBBAG UMUM

Tugas : Melaksanakan urusan ketatausahaan, urusan kerumahtanggaan, urusan pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah, urusan kehumasan, urusan kepegawaian, dan keuangan di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika.

**BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**

Tugas : Memverifikasi, mengkoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang informasi dan komunikasi publik.

a. Seksi Komunikasi Publik dan Kemitraan

Tugas : menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan, perumusan kebijakan teknis komunikasi publik dan kemitraan.

b. Seksi Pengelolaan dan Penyediaan Informasi

Tugas : menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis.

c. Seksi Pengelolaan Media Publik

Tugas : menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pengelolaan media publik.

**BIDANG PENYELENGGARAAN e-GOVERNMENT**

Tugas : memverifikasi, mengkoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi, dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang *e-Government*.

a. Seksi Infrastruktur dan Teknologi

Tugas : menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis infrastruktur dan teknologi.

b. Seksi Aplikasi Telematika

Tugas : menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis aplikasi telematika.

c. Seksi Keamanan Informasi

Tugas : menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis keamanan informasi.

**BIDANG PEMBERDAYAAN TIK, STATISTIK, PERSANDIAN**

Tugas: memverifikasi, mengkoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi, dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang pemberdayaan TIK, statistik dan persandian.

a. Seksi Pemberdayaan TIK dan Masyarakat

Tugas: menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pemberdayaan TIK dan masyarakat.

b. Seksi Pengelolaan Data dan Statistik

Tugas : menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pengelolaan data dan statistik.

c. Seksi Persandian

Tugas : menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis Persandian.

**1.5. Aspek Strategis**

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melaksanakan pembangunan dalam bidang komunikasi dan informatika memiliki aspek strategis yaitu

1. Terwujudnya saran dan prasarana teknologi informasi yang terintegritas dengan Kabupaten/ Kota;
2. Optimalisasi kemampuan SDM dalam teknologi informasi dan komunikasi
3. Terwujudnya masyarakat yang berwawasan teknologi informasi.

Peran Dinas Komunikasi dan Infromatika dalam memberikan layanan informasi dan pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam rangka mempercepat proses layanan masyarakat sesuai

dengan kemampuan dalam pemanfaatan TIK melalui pembangunan infrastruktur TIK

### 1.6. Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di tahun 2019 dalam melaksanakan pengelolaan urusan Pemerintahan didukung sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Kualifikasi Pendidikan Pegawai S3 sebanyak 1 orang, S2 sebanyak 11 orang, S1 sebanyak 15 orang, D3 sebanyak 13 orang, SMU sebanyak 3 orang. Berdasarkan eselonering yang menduduki jabatan eselon II sebanyak 1 orang, eselon III sebanyak 4 orang dan eselon IV sebanyak 10 orang.

Klasifikasi Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019 berdasarkan jenjang pendidikan, eselonering dan klasifikasi berdasarkan golongan adalah seperti tabel di bawah ini:

**Klasifikasi PNS Dinas Komunikasi dan Informatika  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Doktoral/ S3	1	0	1
2	Pasca Sarjana/ S2	8	3	11
3	Sarjana / S1	12	3	15
4	Diploma-IV			0
5	Diploma-III	7	6	13
6	Diploma-I/II			0
7	SLTA	2	1	3
<b>JUMLAH</b>		30	13	43

**Klasifikasi PNS  
Dinas Komunikasi dan Informatika  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Berdasarkan Eselonering**

No	Tingkat Eselon	Jumlah Pegawai		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	II	1	0	1
2	III	3	1	4
3	IV	8	2	10
4	JFU	11	6	17
5	JFT	5	6	11
<b>JUMLAH</b>		28	15	43

## **1.7. SISTEMATIKA PENULISAN**

Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2019. Capaian kinerja tahun 2019 diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja tahun 2019 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Adapun sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategis issued*) yang sedang dihadapi.

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019.

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **a. Capaian Kinerja Organisasi**

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Povinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

#### **b. Realisasi Anggaran**

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

### **BAB IV PENUTUP**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan, sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, hasil dari proses ini berupa rencana kinerja tahunan.

Review terhadap penetapan kinerja 2019 harus disesuaikan dengan rencana strategis 2012-2017. Dalam rencana strategis (Renstra) atau dalam penetapan kinerja 2019 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat 5 (lima) sasaran strategis, yaitu :

1. Meningkatnya layanan interaktif pemerintah kepada masyarakat;
2. Meningkatnya Jaringan Infrastruktur Teknologi Informasi untuk layanan pemerintah dan layanan publik;
3. Meningkatnya Data dan informasi yang digunakan untuk perencanaan dan pengambilan kebijakan;
4. Meningkatnya penerapan e-Government di Prov. Kep. Bangka Belitung ;
5. Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi publik.

Dalam penetapan kinerja tahun 2019 telah ditetapkan sasaran, indikator kinerja, dan target sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik oleh Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap kinerja pelayanan publik oleh Perangkat Daerah	100%
2.	Meningkatnya layanan interaktif pemerintah kepada masyarakat.	Persentase layanan interaktif pemerintah kepada masyarakat	40%
3.	Meningkatnya Jaringan Infrastruktur Teknologi Informasi untuk layanan pemerintah dan layanan publik	Persentase Jaringan Infrastruktur Teknologi Informasi untuk layanan pemerintah daerah dan layanan umum	35%
4.	Meningkatnya Data dan informasi yang digunakan untuk mengambil kebijakan dan perencanaan	Persentase Data dan informasi yang digunakan untuk mengambil kebijakan dan perencanaan	70%

5.	Meningkatnya penerapan e-Government di Prov. Kep. Bangka Belitung	Persentase penerapan e-Government di Prov. Kep. Bangka Belitung	40%
6.	Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi publik	Persentase informasi yang dipublikasikan untuk masyarakat	75%

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**A. Capaian Kinerja Organisasi**

Pengukuran kinerja dilakukan setiap akhir periode instansi pemerintah yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja.

Pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja.

**Tabel 3**  
**Pengukuran Kinerja**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Persentase tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan  Predikat (nilai) SAKIP Perangkat Daerah	100%  B	100%  BB	100%
2.	Meningkatnya layanan interaktif pemerintah kepada masyarakat.	Persentase layanan interaktif pemerintah kepada masyarakat	40%	60,00%	150,00%
3.	Meningkatnya Jaringan Infrastruktur Teknologi Informasi untuk layanan pemerintah dan layanan publik	Persentase Jaringan Infrastruktur Teknologi Informasi untuk layanan pemerintah daerah dan layanan umum	35%	90,00%	257,14%
4.	Meningkatnya Data dan informasi yang digunakan untuk mengambil kebijakan dan perencanaan	Persentase Data dan informasi yang digunakan untuk mengambil kebijakan dan perencanaan	70%	100%	142,86%
5.	Meningkatnya penerapan e-Government di Prov. Kep. Bangka Belitung	Persentase penerapan e-Government di Prov. Kep. Bangka Belitung	40%	100%	250,00%
6.	Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi publik	Persentase informasi yang dipublikasikan untuk masyarakat	75%	92,67%	123,56%

**Sasaran Strategis 1 :** Meningkatnya layanan interaktif pemerintah kepada masyarakat .

Untuk mengukur meningkatnya layanan interaktif pemerintah kepada masyarakat di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggunakan indikator Persentase layanan interaktif pemerintah kepada masyarakat.

**Tabel 3.1.**  
**Meningkatnya Layanan Interaktif Pemerintah Kepada Masyarakat**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase layanan interaktif pemerintah kepada masyarakat	40%	60,00%	150,00%

Dari tabel 3.1. di atas dapat dilihat bahwa layanan interaktif pemerintah kepada masyarakat sudah melewati target dikarenakan layanan yang diberikan dimanfaatkan masyarakat

Program	Kegiatan	Target		Realisasi		Target Capaian	
		Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
Pemberdayaan TIK Statistik dan Persandian	Pemberdayaan TIK	20 kali layanan interaktif	1.303.864.000,00	20 kali layanan interaktif	989.090.216,00	100%	75,86%
	Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Persandian	5 layanan	12.633.785,00	1 layanan	1.000.000	20%	7,92%
						60,00%	41,89%

Layanan interaktif merupakan layanan internet yang dilaksanakan dinas Kominfo di desa-desa untuk memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat, pelajar, pelaku usaha kecil mengenai keterbukaan informasi dan cara pemanfaatan teknologi informasi. Adapun 20(dua puluh) kali layanan interaktif tersebut berupa layanan internet gratis ke masyarakat dan sosialisasi penggunaan internet sehat. Layanan tersebut dilakukan di desa-desa yang tersebar di 6(enam) kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

**Sasaran Strategis 2 :** Meningkatnya jaringan infrastruktur teknologi informasi untuk layanan pemerintah dan layanan publik

Untuk mengukur meningkatnya jaringan infrastruktur teknologi informasi untuk layanan pemerintah dan layanan publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggunakan indikator persentase jaringan infrastruktur teknologi informasi untuk layanan pemerintah daerah dan layanan umum.

**Tabel 3.2****Meningkatnya jaringan infrastruktur teknologi informasi untuk layanan pemerintah dan layanan publik**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase jaringan infrastruktur teknologi informasi untuk layanan pemerintah daerah dan layanan umum	35%	90,00%	257,14%

Dari tabel 3.2. di atas dapat dilihat bahwa meningkatnya jaringan infrastruktur teknologi informasi untuk layanan pemerintah dan layanan public telah memenuhi target yang direncanakan.

		Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAN PEMERINTAH BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI	Pengembangan dan Pengelolaan Infrastruktur dan Teknologi	1 Paket data center, 1 paket colocation, 2 paket internet	5.848.160.000,00	1 Paket data center, 1 paket colocation, 2 paket internet	5.636.294.377,00	100%	96,38%
	Penguatan jaringan komunikasi data pemerintah	20 Radio acces point, 10 radio point to point, 20 manage switch, 20 swf module	265.325.000,00	20 Radio acces point, 10 radio point to point, 20 manage switch,	39.950.000,00	80%	15,06%
						90,00%	55,72%

Persentase jaringan infrastruktur teknologi informasi untuk layanan pemerintah daerah dan layanan umum.

**JARINGAN INFRASTRUKTUR LAYANAN PUBLIK DAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

NO.	LAYANAN FO (FIBER OPTIC)	LAYANAN RADIO	BELUM ADA LAYANAN
1	INSPEKTORAT PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	DINAS KEHUTANAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PROVINSI	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

	BELITUNG	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	
3	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	PTSP (BANDARA LAMA)	RUMAH SAKIT JIWA
4	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG		RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
5	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG		UPT UMKM
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG		PUSAT LAYANAN AUTIS BANGKA BELITUNG
7	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG		PUSAT LAYANAN AUTIS BANGKA BELITUNG
8	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG		
9	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG		
10	DINAS PERTANIAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG		
11	BADAN KEUANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG		
12	DINAS TENAGA KERJA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG		
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG		

14	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG		
15	DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG		
16	DINAS PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG		
17	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG		
18	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG		
19	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG		
20	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG		
21	DINAS SOSIAL PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG		
22	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG		
23	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG		
24	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG		
25	SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG		

26	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG		
----	--	--	--

**Sasaran Strategis 3:** Meningkatnya data dan informasi yang digunakan untuk mengambil kebijakan dan perencanaan.

Untuk mengukur meningkatnya data dan informasi yang digunakan untuk mengambil kebijakan dan perencanaan di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggunakan indikator persentase data dan informasi yang digunakan untuk mengambil kebijakan dan perencanaan

**Tabel 3.3**  
**Meningkatnya data dan informasi yang digunakan untuk mengambil kebijakan dan perencanaan**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase data dan informasi yang digunakan untuk mengambil kebijakan dan perencanaan	70%	100%	142,86%

Dari tabel 3.3. di atas dapat dilihat bahwa persentase data dan informasi yang digunakan untuk mengambil kebijakan dan perencanaan telah tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

		Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN TIK, STATISTIK DAN PERSANDIAN	Inventarisasi dan Pengelolaan Data sektoral	8 kelompok parameter	31.175.000,00	7 kelompok parameter	8.934.200,00	100%	28,66%
	Pengembangan, Pengelolaan dan Optimalisasi Pemanfaatan Data/Informasi/Statistik Daerah	200 buku	84.245.000,00	200 buku	59.800.000,00	100%	70,98%
						100%	49,82%

Persentase data dan informasi yang digunakan untuk mengambil kebijakan dan perencanaan merupakan 8(delapan) kelompok parameter data. Yaitu data umum, data ekonomi dan

keuangan, data infrastruktur, data politik, hukum dan keamanan, data industri, data SDA, data sosial budaya dan data insidental.

**Sasaran Strategis 4:** Meningkatnya penerapan e- Government di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Untuk mengukur meningkatnya Meningkatnya penerapan e- Government di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggunakan indikator persentase penerapan e-Government di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

**Tabel 3.4**

**Meningkatnya penerapan e- Government di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
persentase penerapan e-Government di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	40%	100%	250%

Dari tabel 3.4. di atas dapat dilihat bahwa penerapan e-Government di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah optimal disebabkan karena tingginya kemauan perangkat daerah yang menerapkan e-government dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Program	Kegiatan	Target		Realisasi		Target Capaian	
		Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Capaian
<b>PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAN PEMERINTAH BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI</b>	Kapasitas layanan publik dan pemerintah berbasis e-Government	7 lisensi aplikasi pendukung 1 Paket website	411.787.480	update 40 website, 1 aplikasi layanan, 2 lisensi pendukung	368.616.000	100%	89,52%
	Pengawasan dan Pengendalian keamanan sistem informasi	0 insiden	92.500.000	0 insiden	79.068.000	100%	85,48%
	Perumusan Kebijakan Teknis dan SDM Keamanan Informasi	2 kebijakan, 3 SDM keamanan informasi, 40 peserta sosialisasi Informasi security awareness	105.780.000	2 kebijakan, 3 SDM keamanan informasi, 40 peserta sosialisasi Informasi security awareness	72.603.400	100%	68,64%
						100%	81,21%

Persentase penerapan e-Government di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilihat dari banyaknya Perangkat daerah di Prov Kepulauan Bangka Belitung yang telah menerapkan pelaksanaan e-government dimasing-masing perangkat daerah.

Persentase penerapan dilihat dari aplikasi yang tersedia (digunakan) dibagi jumlah aplikasi yang ada.

#### **Daftar Aplikasi yang dimiliki Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

<b>No</b>	<b>Nama Aplikasi</b>	<b>Instansi yang menggunakannya</b>
1	INLIS (Integrasi & Library Sistem)	Arsip dan Perpustakaan
2	Sistem Aplikasi Arsip	Arsip dan Perpustakaan
3	SIMBADA (Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah)	BAKUDA
4	Sistem Informasi Manajemen dan Akutansi Barang Milik Negara	BAKUDA
5	SIM SAMSAT	BAKUDA
6	SIMDA Keuangan	BAKUDA
7	Sistem Informasi Geografis	Bappppeda
8	SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah)	Bappppeda
9	Sistem Entry Usulan Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappppeda
10	e-Planning	Bappppeda
11	Sistem Informasi Kartu Kendali Perjalanan Dinas	Bappppeda
12	Aplikasi kinerja	Biro Organisasi
13	e - Monev (Monitoring dan Evaluasi Elektronik)	Biro Pembangunan
14	TEPPRA ( Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran)	Biro Pembangunan
15	SIMPEG ( Sistem Informasi Kepegawaian)	BKPSDMD
16	Sistem Aplikasi Cuti	BKPSDMD
17	Sistem Aplikasi CPNSD	BKPSDMD
18	SAPK (Sistem Aplikasi Pengelolaan Data Kepegawaian)	BKPSDMD
19	Sistem Informasi Absens Sidik Jari	BKPSDMD
20	SIRUP(Sitem Informasi Rencana Umum Pengadaan)	BLP
21	e-Purchasing	BLP
22	Report LPSE	BLP
23	Sistem Informasi Lelang	BLP
24	DAPODIK (Data Pokok Pendidikan)	DIKNAS
25	Aplikasi UN	DIKNAS
26	Aplikasi Pelaporan BOS	DIKNAS

No	Nama Aplikasi	Instansi yang menggunakannya
27	Bank Data SDM Kesehatan	DINKES
28	Sistem Informasi Gizi	DINKES
29	Pemantauan Status Gizi (PSG 2014)	DINKES
30	Aplikasi Bantuku	Diskominfo
31	Sistem Informasi Tenaga Kerja	Disnaker
32	Aplikasi Kartu Nelayan	DKP
33	Aplikasi Statistik Perikanan Budidaya	DKP
34	Aplikasi Data Statistik Perikanan Tangkap	DKP
35	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	DP3CSKB
36	Aplikasi Data Desa	DPMPD
37	SPIPSE (Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Secara Elektronik)	DPPTPM
38	siMAYA (Sistem Informasi Surat elektronik	Diskominfo
39	sibabel (Portal website Bangka Belitung Berbasis Android)	Diskominfo
<b>Jumlah Aplikasi</b>		<b>39</b>
<b>Jumlah Perangkat Daerah / Instansi</b>		<b>15</b>

**Sasaran Strategis 5:** Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi publik

Untuk mengukur Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi publik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggunakan indikator persentase informasi yang dipublikasikan untuk masyarakat

**Tabel 3.5**

**Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi publik**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase informasi yang dipublikasikan untuk masyarakat	75%	92,67%	123,56%

Dari tabel 3.5. di atas dapat dilihat bahwa sudah optimalnya persentase informasi yang dipublikasikan untuk masyarakat, untuk akses pelayanan informasi publik yang diterima di wilayah Bangka Belitung penyebaran informasi publik lumayan merata yang berimplikasi pada pencapaian target yang maksimal.

Program	Kegiatan	Target		Realisasi		Target Capaian	
		Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Saluran Komunikasi Pemerintah Daerah dan Non Pemerintah Daerah	1 saluran dikelola, 9 saluran difasilitasi	1.252.380.000,00	1 saluran dikelola, 9 saluran difasilitasi	1.112.940.647,00	90%	88,87%
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	3358 berita/informasi dari berbagai media, 1 kali pameran, 2 kali penerbitan majalah	1.228.000.000,00		1.136.199.305,00	90%	92,52%
	Pengelolaan Kemitraan	50 kemitraan, 4 kali pertemuan, 2 kali rakornas, 1 kali pameran pembentukan kampung radio, 1 keg SAIK Nasional	3.318.150.000,00	50 kemitraan, 4 kali pertemuan, 2 kali rakornas, 1 kali pameran pembentukan kampung radio, 1 keg SAIK Nasional	2.711.387.840,00	88,00%	81,71%
	Pengelolaan Aspirasi Publik Lingkup Pemerintah Daerah	100 opini/aspirasi publik, 1 pertemuan, 1 Binteks	59.850.000,00	100 opini/aspirasi publik, 1 pertemuan, 1 Binteks	59.800.000,00	100%	99,92%
						92,67%	91,38%

Informasi yang terpublikasikan untuk masyarakat berupa jumlah berita yg terpublikasi tahun 2019 sebanyak 2.983 berita/informasi.

## B. Realisasi Anggaran

Di bawah ini realisasi anggaran yang digunakan sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase %
1		3	4	5	6	7
Meningkatnya ketersediaan data dan informasi statistik yang digunakan untuk perencanaan dan pengambilan kebijakan	Persentase data dan informasi statistik yang digunakan perencanaan dan pengambilan kebijakan	75%	Program Pemberdayaan TIK, Statistik dan Persandian			
			Kegiatan Inventarisasi dan Pengelolaan data sektoral daerah	Rp 31.175.000	Rp 8.934.200	28,66%
			Program Pemberdayaan TIK, Statistik dan Persandian			
			Kegiatan Pengembangan, Pengelolaan dan Optimalisasi Pemanfaatan Data/Informasi/Statistik Daerah	Rp 84.245.000	Rp 59.800.000	70,98%
Meningkatnya Pemberdayaan TIK Statistik dan Persandian	Persentase PD yang memanfaatkan layanan persandian	40%	Program Pemberdayaan TIK, Statistik dan Persandian			
			Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Persandian	Rp 12.633.785	Rp 1.000.000	7,92%
	Persentase masyarakat yang mendapatkan pemberdayaan TIK	40%	Program Pemberdayaan TIK, Statistik dan Persandian			
			Kegiatan Pemberdayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Rp 1.303.864.000	Rp 989.090.216	75,86%
Meningkatnya Infrastruktur penyelenggaraan Pemerintah berbasis teknologi		35%	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Teknologi informasi			
			Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Infrastruktur dan Teknologi	Rp 5.848.160.000	Rp 5.636.594.377	96,38%
			Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Teknologi informasi			
			Kegiatan Layanan Publik dan Pemerintah Berbasis E-Government	Rp 411.787.480	Rp 368.616.000	89,52%
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang berbasis Informasi	Persentase penyelenggaraan pemerintah yang berbasis Teknologi Informasi	25%	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Teknologi informasi			
			Kegiatan Penguatan Jaringan Komunikasi Data Pemerintah	Rp 265.325.000	Rp 39.950.000	15,06%
Meningkatnya sistem informasi pemerintah daerah yang aman	Persentase sistem informasi pemerintah daerah yang aman	15%	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Teknologi informasi			
			Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Keamanan Sistem Informasi	Rp 92.500.000	Rp 79.068.000	85,48%
			Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Teknologi informasi			
			Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan SDM Keamanan Informasi	Rp 105.780.000	Rp 72.603.400	68,64%

Meningkatnya kesesuaian informasi publik terhadap kebijakan/program daerah yang dapat diakses oleh masyarakat	Persentase kesesuaian informasi publik terhadap kebijakan/program daerah yang dapat diakses masyarakat	75%	Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik			
			Pengelolaan Saluran Komunikasi Pemerintah Daerah dan Non Pemerintah Daerah	Rp 1.252.380.000	Rp 1.112.940.647	88,87%
			Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik			
			Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp 1.228.000.000	Rp 1.136.199.305	92,52%
			Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik			
			Pengelolaan Kemitraan	Rp 3.318.150.000	Rp 2.711.387.840	81,71%
			Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik			
			Pengelolaan Aspirasi Publik Lingkup Pemerintah Daerah	Rp 59.850.000	Rp 59.800.000	99,92%

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Keberhasilan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan misi yang diembannya dalam pencapaian sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019. Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kominfo Tahun 2019 juga memiliki peran sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance dan dalam perspektif yang lebih luas. Selain itu, Laporan Kinerja juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban Dinas Kominfo Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada masyarakat. Sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka diharapkan pencapaian kinerja Dinas Kominfo Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019 dengan kualitas pelaksanaan baik dari sebelumnya pada tahun 2019, sehingga perlu ditingkatkan kinerjanya untuk mencapai prestasi yang lebih baik hingga tahun – tahun berikutnya.

Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja tahun 2019, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sasaran strategis pertama “Meningkatnya layanan interaktif pemerintah kepada masyarakat” dengan indikator kinerja Persentase layanan interaktif pemerintah kepada masyarakat, pada tahun 2019 tercapai 60,00 %
2. Sasaran strategis kedua “Meningkatnya jaringan infrastruktur teknologi informasi untuk layanan pemerintah dan layanan public” dengan indikator kinerja Persentase jaringan infrastruktur teknologi informasi untuk layanan pemerintah dan layanan umum, tercapai dengan 90,00%.
3. Sasaran strategis ketiga “Meningkatnya data dan informasi yang digunakan untuk mengambil kebijakan dan perencanaan” dengan indikator kinerja persentase data dan informasi yang digunakan untuk mengambil kebijakan dan perencanaan tercapai 100%.
4. Sasaran strategis keempat “Meningkatnya penerapan e-Government di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung” dengan indikator persentase penerapan e-Government di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tercapai dengan 100%.
5. Sasaran strategis kelima “Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi publik” dengan indikator persentase informasi yang dipublikasikan untuk masyarakat tercapai dengan 92,67%.

Agar peran Dinas Kominfo Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat optimal dalam fungsinya sebagai penyebarluasan informasi, melalui media secara on line dengan dukungan TIK.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan, sehingga mendapatkan umpan balik guna peningkatan kinerja yang akuntabel bagi Dinas Kominfo Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada periode mendatang.

